



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK

NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

(Studi Kasus Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

(SH)



DI SUSUN OLEH :

NOFRIALDI
11621104016

UIN SUSKA RIAU

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN

SYARIF KASIM RIAU

2020 M / 1441

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : NOFRIALDI

Nim : 11621104016

Program studi : Hukum Keluarga

Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DIKECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember, 2020
Pembimbing skripsi,

Drs. Yusran Sabili, MA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS KECAMATAN UJUNG BATU, KABUPATEN ROKAN HULU)**, yang ditulis oleh :

Nama : NOFRIALDI
 NIM : 11621104016
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 14 Desember 2020
 Waktu : Jam, 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Ade Fariz Fakhrrullah, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.HI, MA

Penguji I
Dra. Asmiwati, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nofrialdi (2020) : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian diKecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu”

Anak merupakan amanah yang diberikan Allah SWT dan penerus keturunan dari keluarganya. Anak sangat berhak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak dari kedua orangtuanya sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Di sisi lain orang tua dari anak berhak melakukan pemeliharaan terhadap anaknya dan bertanggung jawab atas biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut. Bila mana kedua orangtua bercerai yang menjadi permasalahan adalah menyangkut hak asuh anak dan pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian dikecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan kasus yang terjadi mengenai biaya hidup anak, seorang bapak mengabaikan tanggung jawabnya, sehingga tidak menjalankan kewajibannya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi dikecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan hak nafkah anak, untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya pelaksanaan pemberian hak nafkah anak pasca perceraian, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah suami yang telah bercerai dengan istrinya dalam memberikan nafkah kepada anaknya, yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang bercerai dan mempunyai anak Mumayyiz berjumlah 40. Metode pengambilan sample adalah *Random Sampling* yaitu berjumlah 10 pasang suami istri yang telah bercerai. Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian dikecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, ketika kedua orangtua bercerai maka kedua orangtuanya wajib bersama-sama untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anaknya. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz adalah hak ibunya sedangkan nafkah anak di tanggung ayahnya. Sebab ibu diutamakan untuk mengasuh anaknya, karena ibunya yang berhak mendapatkan hadhanah dan ibu yang menyusui serta ibu lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya, karena juga ibu mempunyai rasa kesabaran yang tinggi. Sedangkan dalam hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian baik itu dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam membebankan kewajiban tersebut kepada orang tua laki-laki. Namun orang tua laki-laki lalai terhadap kewajibannya untuk memenuhi hak nafkah anak ada yang memberikan tapi tidak sepenuhnya dan tiap bulan, dan bahkan ada juga yang tidak memberikan nafkah anak tersebut. Penyebabnya adalah faktor ekonomi, faktor tidak bertanggung jawab penuh terhadap nafkah anak, faktor komunikasi, faktor ibu sudah mampu menafkahi anaknya. Sedangkan upaya yang dapat di tempuh oleh ibu jika suami tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Nafkah Anak, Pasca Perceraian.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Efrizal) dan Ibunda (Eni Deswita) tercinta, Kakakku (Fitria Anggreini, Amd Keb) yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorban baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar, M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M. CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M. Ag, dan Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA.
5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA dan Sekretaris Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag, yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
6. Bapak Drs. Yusran Sabili, MA., selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Yuni Herlina S.Hi. M, Sy selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
8. Terima kasih Kepada Bapak Fisman Hendri selaku Camat Kecamatan Ujung Batu yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama penulis melaksanakan penelitian skripsi.
9. Terima kasih kepada Lutfi (Abang), Daud (Atuk), Wiky Rahmayani, yang telah membantu penulis dalam melengkapi data penelitian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.
11. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta seluruh karyawan dan karyawanati yang telah berjasa memberikan pinjaman buku- buku sebagai referensi bagi penulis.

12. Kepada para sahabat (Hermansyah, Desma Royana, Aulia Wulan Sari, Abd. Rahman, Tomi Anggara, Riski Nurza Fajar, Afrizal, Nur Azmi, Lukman), dan keluarga besar Jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2016, terkhusus kepada Jurusan Hukum Keluarga B Angkatan 2016 dari awal kuliah sampai dengan saat ini yang selalu setia memberikan dukungan, semangat dan bantuan untuk memperlancar perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
13. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Harapan dan doa penulis semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Pekanbaru, Desember 2020
Penulis,

NOFRIALDI
NIM. 11621104016



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	18
A. Sejarah Singkat Kecamatan Ujungbatu	18
B. Keadaan Demografi	19
BAB III KAJIAN TEORITIS	24
A. Perceraian	24
B. Nafkah Anak Pasca Perceraian.	32
BAB IV PEMBAHASAN	45
A. Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian	45
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.	61
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	

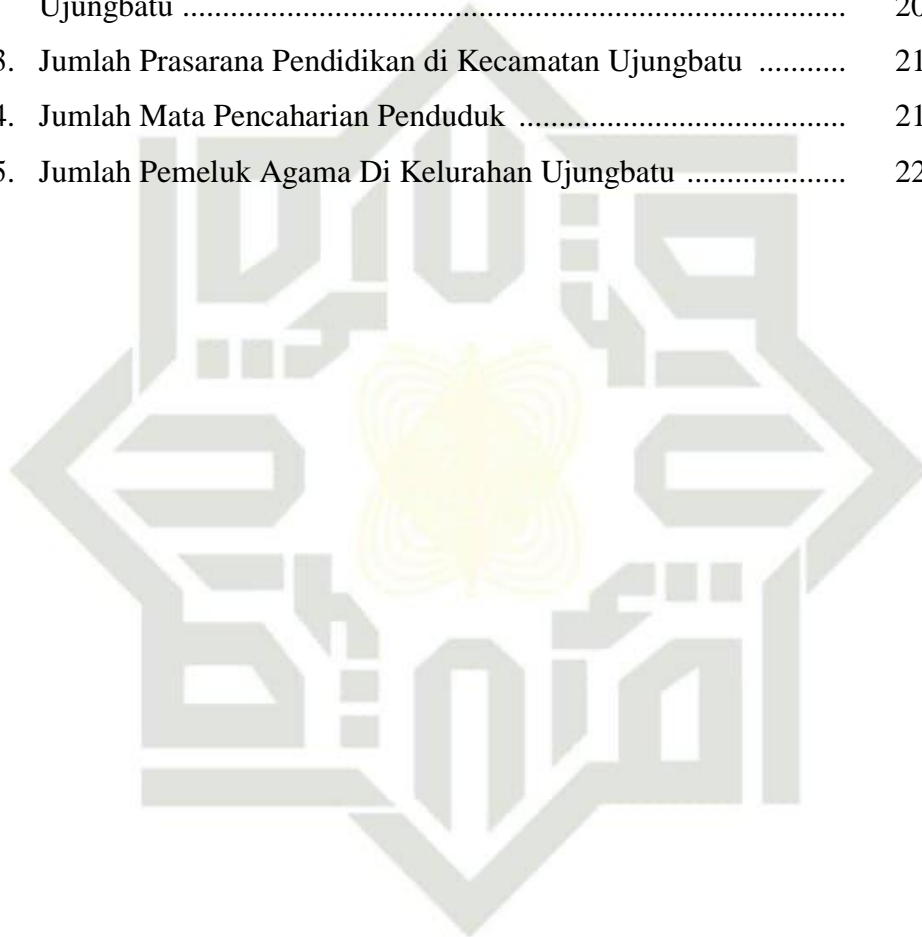


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Ujungbatu	19
Tabel IV 2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Ujungbatu	20
Tabel IV 3. Jumlah Prasarana Pendidikan di Kecamatan Ujungbatu	21
Tabel IV 4. Jumlah Mata Pencaharian Penduduk	21
Tabel IV 5. Jumlah Pemeluk Agama Di Kelurahan Ujungbatu	22



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal satu sama lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dalam bentuk suatu perkawinan¹ yang sudah diatur dengan dasar hukum yang hadir di tengah masyarakat yang menjadi sebuah kebutuhan mutlak, karena dalam mengatur perilaku antara manusia dengan manusia lainnya, diperlukan aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat, masalah perkawinan juga sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi, Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dibina bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika kebencian sudah datang dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya maka akan berujung ke arah putusnya perkawinan.

¹Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Alkausar, 2002), h. 3

²Penerbit merah putih, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: percetakan Galangpress, 2009) ,h.12



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thalaq artinya melepaskan ikatan pernikahan, atau memutuskan hubungan pernikahan saat itu juga dengan thalaq ba'in, atau di kemudian waktu dengan thalaq Raj'i yakni setelah masa waktu tertentu dengan lafaz tertentu.³ Menurut asalnya thalaq itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah SAW

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ أَطْلَاقُ

Artinya :

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq”

(Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim).⁴

Pada dasarnya suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Nafkah ialah sesuatu yang diberikan suami kepada isteri dan anaknya untuk memenuhi keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan biaya pendidikan bagi anaknya. Adapun syarat-syarat istri dapat menerima nafkah ialah telah terjadinya akad yang sah antara suami dan istri, istri sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya dan telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.⁵

Memberi nafkah merupakan salah satu kewajiban dari suami setelah terjadinya pernikahan yang sah. Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

³ Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta : Qisthi Press), h.583

⁴ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta Timur : Darul Falah), h.599

⁵ Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h. 164-165



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 2:233)⁶

Ayat ini turun (asbabunnuzul) sebagai petunjuk atas beberapa peristiwa yang dianggap melecehkan posisi bayi pada zaman jahiliyyah. Sehingga dibutuhkan penegasan (petunjuk) atas perilaku kasih sayang kepada seorang anak lewat penyusuan. Setiap ibu (meskipun janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai usia dua tahun. Kalau dikurangi dari masa tersebut apabila kedua ibu-bapak memandang ada masalahnya.⁷

⁶Dapertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT, Sygma Examedia, 2009, h. 57.

⁷ Muhammad Asad, Ibid, hal. 51. Bandingkan dengan Imam Jalil, Mukhtashor Tafsir Ibnu Katsir, Kairo, Darus Shobuni, tth, hal. 211.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap penyempurnaan susuan selama 2 tahun dalam surat Al-Baqarah 233, beberapa ulama memberikan penafsiran sebagai berikut :

1. Kata haulaini kamilaini oleh Abi Thohir bin Ya'qub diartikan sebagai dua tahun yang benar-benar sempurna. Dan itu diperuntukkan atas penyusuan anak-anaknya kepada seorang ayah (ya'ni 'ala al-Ab). Dengan demikian, seorang Ibu tidak terlalu mengambil resiko dan tidak terlalu bertanggungjawab secara penuh dalam memberikan penyusuan kepada bayinya.⁸
2. Kedudukan ayat "haulaini kamilaini" menurut Abi Fadl Shihabuddin adalah sebagai tarkib, dimana haulaini sebagai maushuf dan kamilaini sebagai shifat-nya. Maka tidak salah manakala hal ini menjadi petunjuk waktu bahwa kasih sayang kepada anak dalam bentuk penyusuan dianggap sebagai hal krusial yang selanjutnya akan mendapatkan penjelasan persoalan waktu penyusuan yang ideal.⁹
3. Prof. Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar berpendapat bahwa dii ayat ini bertemu pula apa yang dialami oleh ilmu ketabiban modern, bahwasanya air susu ibu lebih baik dari susu yang lain. Di sebut pula di sini bahwa masa penyusuan yang baik disempurnakan dua tahun¹⁰

Dari beberapa tafsiran surat al-Baqarah ayat 233 ini dapat diambil tiga garis besar:

⁸ Abi Thohir bin Ya'qub, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*, Beirut, Darul Fikr, 1995, hal.37.

⁹ Abi Fadl Shihabuddin, *Ruhul Ma'ani fi Tafsiri Al-Qur'an Al-Adzim*, jilid I, Beirut: Darul Fikr, 2001. Hal. 539.

¹⁰ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar, juz II*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1984, hal 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Posisi ayah adalah sebagai seorang yang bertanggungjawab atas kualitas susu istrinya.
2. Ibu mencoba untuk menjalankan kasih sayang dengan penyusuan dalam masa dua tahun secara sempurna.
3. Tidak diperbolehkan untuk menyapih sebelum usia dua tahun, kecuali dengan persetujuan antara ayah dan ibu dan anak pun dianggap sudah dewasa.

Pemeliharaan anak dalam bahasa fiqh disebut dengan *hadhanah*.

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya.¹¹

Hadhanah adalah pemeliharaan anak atau memberikan anak nafkah yang belum mampu hidup mandiri berupa aspek kebutuhan yang diperlukannya, baik dalam melaksanakan kebutuhan hidup maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya. Pemeliharaan anak memenuhi beberapa aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam Islam diperintahkan bahwa tanggung jawab kebutuhan hidup ada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga.

Firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 175.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

نُشَوِّهِمْ فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Qs An-Nisa: 34)¹²

Jika pasangan suami istri bercerai dan dari perkawinan mereka mempunyai anak yang belum mumayyiz, maka istrilah yang paling berhak untuk memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa, karena ibulah yang biasanya lebih telaten dan sabar. Selang waktu itu, hendaklah anak tinggal bersama ibunya. Sedangkan mempunyai anak yang sudah mumayyiz, kepada anak diberikan hak untuk memilih antara ibu atau ayah. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap menjadi kewajiban ayahnya.¹³ Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :

Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. (QS. Al-Baqarah 2:233)¹⁴

Jika berbicara mengenai anak-anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian pasti juga membicarakan tentang nafkah. Suami yang menjatuhkan

¹² Dapertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, *Op.Cit.*, h. 123.

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjemah: Abdul Ghoffur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, h.391.

¹⁴ *Ibid* h. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

talak pada istrinya, ia wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami.¹⁵

Dalam Undang-Undang no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak di jelaskan pada pasal 1 ayat 1 (kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial) dan pada pasal 2 disebutkan mengenai hak-hak anak.

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Berdasarkan Al-Quran, Hadist, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hadhanah dan nafkah setelah perceraian merupakan kewajiban para suami, namun pada prakteknya di sebagian besar masyarakat

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang pemberian hak nafkah anak pasca perceraian. Bahwasanya Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) di sebutkan “semua biaya *Hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹⁶

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat masih banyak orang tua yang laai dalam memelihara anak. Hal tersebut terjadi pada cerai gugat maupun cerai talak. Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu anak seringkali menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya, anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, disamping itu nafkah dan pendidikan anak tersebut dapat terganggu¹⁷, dalam hal ini seorang ibu yang lebih sering mendapatkan wewenang untuk mengasuh anak, harus menanggung semua nafkah pemeliharaan anaknya tanpa adanya tanggung jawab dari seorang ayah. Padahal Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anaknya.

Terhambatnya pelaksanaan pemberian nafkah anak oleh ayah setelah perceraian merupakan problem sosial yang nyata di masyarakat di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Masalah yang luput dari mata hukum ini banyak mengakibatkan kerugian terhadap janda-janda dan anak mereka. Hanya sedikit ibu yang mampu membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak seorang diri.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (cet4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h. 72-73

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2005), h. 116.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Nurhasana warga di Kecamatan Ujung Batu ia mengatakan bahwa “Pada awalnya suaminya memberikan nafkah anak, akan tetapi hanya beberapa bulan saja. Setelah mantan suami menikah lagi dengan mantan istri sebelumnya, seketika itu tidak memberikan nafkah lagi kepada anak tersebut”.¹⁸ Wawancara selanjutnya yaitu dengan Delni Narhan ia mengatakan bahwa “Setelah perceraian suaminya langsung pindah dari Kecamatan Ujung Batu dan tidak memberikan nafkah iddah dan nafkah anak kepada saya.”¹⁹

Berdasarkan fenomena yang terjadi sekarang ini, kiranya perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian. Maka dari itu penulis bermaksud untuk membahas tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU.”**

Penulis memilih meneliti di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu karena kecamatan ini merupakan salah satu daerah tingkat perceraian yang cukup tinggi, baik cerai di Pengadilan maupun cerai di luar Pengadilan Agama dan kebanyakan mempunyai anak mumayyiz.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Nurhasana Warga di Kecamatan Ujung Batu Pada Hari Sabtu 30 November 2019

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Delni Narhan Warga di Kecamatan Ujung Batu Pada Hari Minggu 01 Desember 2019

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan di bahas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan di fokuskan pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Ujung Batu?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian hak nafkah anak pasca perceraian Kecamatan Ujung Batu?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Ujung Batu.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di kecamatan ujung batu
- b) Untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya pelaksanaan pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Ujung Batu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Ujung Batu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian dikecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam dan Pengadilan Agama.
- c. Supaya berguna dan bermanfaat buat orang-orang yang ingin mempelajari atau membacanya.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang berjudul Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer) menyimpulkan bahwa mantan istri bisa mendapatkan nafkah sampai mantan istri meninggal atau menikah lagi. Karena jauh dari rasa keadilan bila istri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode iddah, karena pada dasarnya semua manusia itu sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberikan kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Dalam analisis skripsi ini hasilnya adalah bahwasanya kriteria mantan istri yang mendapatkan nafkah adalah: (1) seorang wanita yang telah dicerai dan tidak mampu memelihara dirinya sendiri (miskin), (2) seorang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita yang sudah tua usianya, (3) wanita tersebut tidak memiliki sanak famili. Sedangkan yang kedua bahwasanya pemikiran Asghar memiliki relevansi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 (c), yang mana juga sudah dijelaskan dalam KHI yang memberikan nafkah kepada mantan istri sampai masa iddah. Di dalam skripsi tersebut hanya membahas kewajiban suami terhadap kewajiban pemberian nafkah, tidak ada pembahas tentang pelaksanaan kewajiban suami terhadap anak dan hak-hak istri. Sedangkan penulis membahas tentang implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian yang tidak terlaksana dan faktor-faktor yang tidak dilaksanakan pemberian nafkah tersebut.²⁰

Kemudian hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Fina Nuriani mahasiswi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Mungkid)” ada unsur kesamaan dengan penulis yaitu adanya pembahasan tentang nafkah yang diberikan kepada anak, akan tetapi objek serta pokok masalah berbeda, dalam skripsi tersebut lebih banyak membahas nafkah terhadap istri. Akan tetapi skripsi Fina Nuriani lebih berfokus pada ketidakmampuan dan penolakan mantan suami untuk menjalankan kewajibannya. Sedangkan yang dimaksud penulis adalah pada pengingkaran mantan suami yang tidak menjalankan putusan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama serta faktor-faktor tidak dilaksanakannya putusan tersebut.²¹

Dari tulisan di atas terlihat bahwa penulis telah berusaha mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan nafkah anak. Akan tetapi sepanjang pengetahuan

²⁰ Uswatun Hasanah, Judul Skripsi, *Nafkah Untuk Mantan Istri* (Studi Analisis Pandangan Agsar Ali Engineer) Semarang, 2008.

²¹ Fina Nuriani “*Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak* (Studi Kasus Pengadilan Agama Mungkid)” Yogyakarta, 2004



penulis, permasalahan tentang Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Tinjauan Hukum Islam belum pernah diteliti orang, karena itulah dilakukan penelitian ini.

Metode Penelitian

Metode yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pasangan suami istri yang telah bercerai dan anak-anak mereka yang mesti mendapatkan hadhanah di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama yang mengetahui kejadian tersebut dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah suami yang telah bercerai dengan istrinya dalam memberikan nafkah kepada anaknya, adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian di Kecamatan Ujung Batu Kecamatan Rokan Hulu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi, adalah keseluruhan (universum) dari objek/ subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/ objek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan suami istri yang bercerai dan mempunyai anak belum dewasa berjumlah 40.²³
- b. Sampel, penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁴ Maka penulis mengambil sampel sebanyak 10 pasang suami istri yang telah bercerai, dengan menggunakan teknik random sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan acak sederhana. Artinya pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala-gejala yang di lapangan.
- b. Wawancara, mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dan informan tentang masalah yang diteliti.

²² Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 30.

²³ Bersumber *Pengadilan Agama Pasir Pengaraian*, Kabupaten Rokan Hulu.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet Ke-19, h. 80

- c. Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.²⁵

6 Metode Analisa Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta lain kemudian fakta-fakta tersebut di analisis dan diambil suatu kesimpulan.

7 Metode Penulisan

Teknik-teknik yang digunakan penulis dalam penulisan adalah sebagai berikut:

a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya di analisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

b. Induktif

Dengan metode ini, penulis juga memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.²⁶

c. Deskriptif

Mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta dianalisi, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini. Dalam metode ini, ketika data di dapatkan, maka penulis akan

²⁵ Burhan. Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika 2007), h. 121

²⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h. 40



memberikan keterangan untuk menjelaskan data tersebut. Kemudian disusun secara sistematis dan struktur.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun dalam lima bab yang setiap bab mempunyai beberapa sub bab, untuk memudahkan para pembaca maka berikut ini akan diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang sejarah Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, letak geografis, sosial ekonomi masyarakat, pendidikan dan kehidupan beragama, dan sosial budaya masyarakat.

BAB III : TINJAUAN TEORI TENTANG NAFKAH DAN NAFKAH ANAK DI DALAM ISLAM

Bab ini berisikan tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, akibat hukum putusnya perkawinan, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam pemberian nafkah, sebab wajib memberikan nafkah, batas usia pemberian hak nafkah anak pasca perceraian, hak dan kewajiban memberikan nafkah anak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: HASIL PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN HAK NAFKAH ANAK DI KECAMATAN UJUNG BATU

Berisi tentang pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian hak nafkah anak pasca perceraian dan Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran

UIN SUSKA RIAU



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Ujungbatu

Kecamatan Ujungbatu merupakan salah satu Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Tandun yang dahulunya beribu kota di Ujungbatu yang dilalui oleh Sungai Rokan dan Sungai Ngaso. Ujungbatu juga merupakan pusat bisnis di Kabupaten Rokan Hulu karena lokasinya yang sangat strategis dengan percepatan ekonomi yang sangat pesat.²⁷ Luas wilayah Kecamatan Ujungbatu adalah 90.57 Km² atau 9057 Ha, memiliki 4 (empat) Desa dan 1 (satu) Kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Utara : Kecamatan Pagaran Tapah Darusslam
- b. Timur : Kecamatan Tandun
- c. Barat : Kecamatan Rambah Samo
- d. Selatan: Kecamatan Rokan IV Koto

Melihat dari pesatnya perkembangan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di Ujungbatu yang dilandasi dari berbagai aspek pekerjaan mulai dari petani sawit, PNS, tukang becak, dan lain-lain. Kini juga menjadi sentral perekonomian kerakyatan yang utama sekali pencarian ekonomi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, mata pencarian Kecamatan Ujungbatu adalah petani perkebunan kelapa sawit, karet, dan pedagang.

Sejarah serta perjalanan singkat Ujungbatu disebut-sebut orang tua jaman dahulu adalah tanah bolobieh, karena dahulu Ujung Batu diapit oleh 2 kerajaan, yakni Kerajaan Kunto Darussalam dan Kerajaan Rokan IV Koto, maka berkelahi kedua kerajaan tersebut. Melihat pembangunan di Kecamatan Ujungbatu ruko-

²⁷ Fisman Hendri, Camat Ujung Batu, Wawancara, 02 Juli 2020

ruko yang menjulang, pusat-pusat perbelanjaan, lembaga-lembaga pendidikan, jalan-jalan dibuat 2 jalur, gedung megah kebanggaan masyarakat melayu Ujung Batu (Lembaga Kerapatan Adat Ujungbatu), serta permainan anak-anak dipertandakan ekonomi masyarakat telah mencapai puncak standar.²⁸

B. Keadaan Demografi

1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah di prioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal besar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensional yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan. Penduduk dalam wilayah Kecamatan Ujungbatu pada tahun 2019 berjumlah 46.749 jiwa.²⁹ Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel IV 6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Ujungbatu

No	Kelurahan/Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Ujungbatu	9.759	9.496	19.255
2	Ngaso	3.017	2.866	5.883
3	Sukadamai	3.758	3.603	7.361
4	Ujungbatu Timur	2.794	2.632	5.426
5	Pematang Tebih	4.629	4.195	8.824
Jumlah		23.957	22.792	46.749

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu, 2019³⁰

²⁸ Ibid

²⁹ Benyamin Yahya, Sekretaris Kecamatan, Wawancara, 02 Juli 2020

³⁰ Sumber : Kantor Camat Ujungbatu, 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tingkat Pendidikan

Faktor tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam era pembangunan sekarang ini. Berkualiasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam wilayah Kecamatan tersebut. Beberapa tahun belakangan ini dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kecamatan Ujungbatu akan pentingnya pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan wilayah Kecamatan Ujungbatu dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:

Tabel IV 7. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Ujungbatu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tamat SD	10.031	21,46%
2	Tamat SMP	8.739	18,69%
3	Tamat SMA	11.298	24,17%
4	Tamat Diploma	6.830	14,61%
5	Tamat S1/S2/S3	9.851	21,07%
Jumlah		46.749	100%

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu, 2019.³¹

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Ujungbatu dikatakan sudah cukup baik, dimana secara mayoritas telah menyandang pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kecamatan Ujungbatu.

3. Sarana dan Prasana

Pendidikan harus ditunjang oleh prasaranayang memadai, pada umumnya prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada dikecamatan Ujungbatu boleh dikatakan hamper seluruhnya tersedia. Prasarana yang tersedia sudah dapat dikatan telah mencukupi sesuai dengan kebutuhan

³¹ Ibid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Jumlah gedung-gedung sekolah yang telah mampu untuk menampung sebagian besar penduduk Kecamatan Ujungbatu pada usia sekolah. Keadaan yang telah disebutkan diatas di tunjang dengan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan di Kecamatan Ujungbatu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV 8. Jumlah Prasarana Pendidikan di Kecamatan Ujungbatu

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD/MI	22	57,90%
2	SMP/MTS	9	23,86%
3	SMA/SMK	7	18,42%
Jumlah		38	100%

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu, 2019.³²

Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa prasarana pendidikan yang paling banyak adalah SD/MI sebanyak 22 gedung (57,90%), berikutnya gedung SLTP sebanyak 9 (23,68), dan terakhir 7 gedung SLTA (18,42%).³³

4. Mata Pencaharian Penduduk

Adapun bebrapa mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang ada di Kecamatan Ujungbatu. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Kecamatan Ujungbatu dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel IV 9. Jumlah Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Petani	10.964	23,45%
2	Nelayan/Perikanan	208	0,45%
3	Buruh	5.575	11,93%
4	PNS/Honorer	3.987	8,53%
5	Pedagang	8.320	17,78%
1	2	3	4
6	Wiraswasta	15.664	33,51%
7	TNI/Polri	644	1,38%
8	Lain-Lain	1.387	2,97%
Jumlah		46.749	100%

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu, 2019

³² Ibid.

³³ Nurmi Aisyah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Wawancara, 02 Juli 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat diketahui dari sekian banyak penduduk Kecamatan Ujungbatu terdapat 10.964 (23,45%) petani, 208 orang (0,45%) sebagai nelayan, 5.575 (17,78%) sebagai buruh, 3.987 (8,53%) sebagai PNS/Honorer, 8.320 (17,78%) sebagai pedagang, 15.664 (33,51%) sebagai wiraswasta, selanjutnya sebagai TNI/Polri 644 (1,38%) dan yang terakhir 1.387 (2,97%) dikategorikan kedalam lain-lain.

5 Kehidupan Beragama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia itu sendiri, kebebasan Bergama di Negara Republik Indonesia di jamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 adalah toleransi antara umat beragama, kerukunan umat beragama tidak mencampur adukkan kepercayaan. Dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang ditangani falsafah Negara Pancasila, dikenal ada 3 kerukunan beragama itu adalah:

1. Kerukunan umat bergama dengan seagama;
2. Kerukunan beragama dengan agama lain; dan
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Ujungbatu dapat dilihat pada tabel :

Tabel IV 10. Jumlah Pemeluk Agama Di Kelurahan Ujungbatu

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	41.452	88,66%
2	Budha	26	0,05%
3	Protestan	4.466	9,55%
4	Katolik	800	1,71%
5	Hindu	5	0,01 %
6	Konghucu	-	-
Jumlah		46.749	100%

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu, 2019.³⁴

³⁴ Sumber, Kantor Camat Ujung Batu, 2019. *Op. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa pemeluk agama mayoritas adalah Bergama Islam yaitu sebanyak 41.452 orang (88,66%), sedangkan minoritas terdapat 4 (empat) agama yaitu Protestan 4.466 orang (9,55%), Katolik 800 orang (0,71%), dan Budha sebanyak 26 orang (0,05%), selanjutnya yang terkhir adalah Hindu yang pemeluknya hanya 5 orang (0,01%).³⁵

³⁵ Fisman Hendri, *Op. Cit.*



BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian.

Ketika berbicara tentang perceraian maka kita tidak akan pernah lepas dari kata *talaq* karena secara harfiah *talaq* itu berarti lepas dan bebas, dihubungkannya kata *talaq* dalam arti kata ini karena ada suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Menurut ulama fiqh suamilah yang berhak menjatuhkan *talaq*, bahkan suami sangat berkuasa dalam menjatuhkan *talaq* ia bisa menjatuhkan *talaq* kapanpun dia kehendaki, ketika ia menjatuhkan *talaq* dengan mengatakan “ kamu saya *talaq*” maka jatuhlah kepada istri yang berakibat putusnya hubungan suami istri.³⁶

Dalam hukum Islam putusnya perkawinan dalam perceraian dapat terjadi karena *talaq* atau gugatan perceraian. Bentuk-bentuk perceraian adalah *talaq*, *khuluk*, *zihar*, *lian*, *syiqaq*, dan *fasakh*. Dalam Undang-undang di jelaskan *talaq* dapat diartikan secara harfiah adalah cerai, namun cerai dalam Undang-undang dapat berbentuk talak, *khulu*, *syiqaq*, dan *lian*.³⁷ Kematian bukanlah termasuk suatu putusnya perkawinan dalam Islam karena perkawinan bersifat abadi sampai kehidupan di akhirat. Hanya saja kematian dapat membebaskan suami atau istri kawin dengan orang yang ia kehendaki.

³⁶ Tutuk Hamidah “*Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*” Malang: UIN Maliki Press, 2011, h. 127.

³⁷ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain perceraian dengan arti *talaq* atau *khulu* semua mungkin dapat diselesaikan dengan keputusan Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikannya.³⁸

Kata *talaq* itu baru muncul di dalam peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 1975. Menurut KHI di jelaskan pada pasal 177, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.³⁹

Di dalam KHI pasal 116 di jelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

³⁸ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Jakarta: Gakrawala Publisng, 2009, h. 3

³⁹ Hadi Abdul "*Fiqh Munakahat*" Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015, h. 156-157.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁰

2. Dasar hukum perceraian

Sesungguhnya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah diharapkan dapat menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk selama lamanya sampai ajal menjemput, sehingga suami-istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, merasakan naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Karenanya, ikatan perkawinan bagi suami istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Secara khusus, Allah swt menyebut ikatan perkawinan ini dengan *Mitsaqan* ghalidzah (perjanjian yang kokoh). Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratannya, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.⁴¹

Para ulama berpendapat tentang hukum talak. Pendapat para ulama adalah hukumnya makruh, jika tidak ada hajat yang menyebabkannya. Karena talak berarti kekufuran terhadap nikmat Allah. Karena sebuah pernikahan itu

⁴⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h.56-57

⁴¹ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Jakarta: Gakrawala Publising, 2009, *Op. Cit.*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah. Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami terhadap perilaku istri dan hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah Maha Membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk terhadap suami, hukumnya makruh.⁴²

Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap memasuki masa *iddah*, seperti firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠٠﴾

Artinya :

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah

⁴² Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Penerjemah : Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar, 2008, h.454-455

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (At-Thalaq: 1)⁴³

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. (Al-Baqarah :232)⁴⁴

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyerukan atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak merupakan termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh.

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a. *Nadab* atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratannya yang lebih banyak akan timbul.

⁴³ Dapertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Sygma Examedia, 2009, *Op. Cit.*, h.945.

⁴⁴ Dapertemen Agama RI, *Ibid*, h.56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. tindakannya itu memudaratkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁴⁵

Adapun rukun dari talak adalah pertama adanya perceraian (suami yang menceraikan). Perceraian dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan seperti Mukallaf dan pilihan sendiri, maksud dari *mukallaf* adalah berakal dan baligh, hal ini sama dengan pendapat para ulama yang sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh (minimal sampai usia belasan tahun dan berdasarkan pilihan sendiri), tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur. Baik talak menggunakan kalimat tegas dan bergantung, seperti perkataan anak kecil: “jika aku baligh istriku terceraikan” atau seorang yang gila yang berkata “jika aku sadar maka engkau terceraikan”, perceraian tidak terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh dan yang gila menjadi sadar. Jika talak mereka diterima atau di anggap sah berarti kita menerima perkataan mereka yang sama sekali tidak

⁴⁵ Amir Syaifudin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*” Jakarta: Kencana, 2009, h. 198-201.

sah. Adapun talaknya orang bodoh dan orang sakit sah sekalipun bercanda sedangkan talaknya orang minum obat atau dipaksa minum khamer tidak sah hukumnya.⁴⁶

Kemudian rukun talak yang kedua adalah adanya ungkapan cerai (*sighat talaq*). Ungkapan *talaq* ini terbagi kedalam beberapa jenis antara lain:

- a. Ungkapan *talaq* dengan bahasa jelas.
- b. Ungkapan *talaq* dengan sindiran.
- c. *Talaq* dengan isyarat.
- d. *Talaq* dengan tulisan dan tangan
- e. *Talaq* bebas dan begantung
- f. *Sighat talaq* pada yang masa akan datang.

Kemudian rukun *talaq* yang ketiga adalah adanya istri yaitu orang yang berada dibawah perlindungan suami dan dia adalah objek yang mendapatkan *talaq*.⁴⁷

3. Akibat Hukum Dari Putusnya Perkawinan.

Adapun dari akibat putusnya perkawinan, maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

- a. Hubungan antara suami istri maka akan menjadi asing sehingga harus saling berpisah dan tidak boleh bergaul lagi sebagaimana saat menjadi suami istri yang berlaku hanyalah antara dua orang yang saling asing.

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas "Al-Usroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam (Terj. Abdul Majid Khon)" *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq* Jakarta: Amzah, 2009, h. 261-262.

⁴⁷ *Ibid*, 263-264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. (jumhur berpendapat bahwa *mut'ah* hanyalah untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti *talaq*, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan sebelum bergaul)
- c. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun *nafaqah*, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukan bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya.
- d. Berlakunya *iddah* untuk istri yang telah diceraikannya.
- e. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.⁴⁸

Adapun dalam KHI juga menjelaskan tentang Akibat Putusnya Perkawinan yaitu pada pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri sudah tersebut *qobla al dukhul*.
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* ke bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nisyuz* dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al duqhul*;

⁴⁸Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁹

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, Jadi ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁵⁰

B. Nafkah Anak Pasca Perceraian.

1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena di bagi atau di berikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena di bagi atau di berikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta

⁴⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, *Op.Cit.*, h.44.

⁵⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Op.Cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.⁵¹

Para ahli fiikih mazhab Hanafi mendefenisikan, nafkah adalah memperbanyak sesuatu dengan tetap mempertahankan keberadaannya. Para ahli fikih mazhab Syafi'i mendefenisikan, nafkah adalah mengeluarkan harta dalam kebaikan. Sedangkan menurut definisi para ahli fikih mazhab Hambali, nafkah adalah memenuhi keperluan orang yang menjadi tanggungan berupa roti, lauk dan pakaian.⁵²

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan adanya sebab istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama daripada kedua sebab lainnya, sementara kewajiban karena nasab lebih utama daripada sebab dibawah pengasuhan. Keutamaan kewajiban karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya.⁵³

Bahwa tidak diragukan lagi masalah nafkah adalah masalah yang sangat pokok dalam kehidupan ini. Tanpa adanya nafkah juga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan, tetapi sebaliknya kekurangan dalam hal nafkah akan menyebabkan terjadinya bermacam-macam kerusakan

⁵¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 76

⁵² Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, alih bahasa oleh Umar Mujahid, (Solo : PT Aqwam Media Profetika, 2012), cet. Ke-1, h. 3

⁵³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Yogyakarta, Graha Ilmu: 2011, *Op. Cit.*, h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga memunculkan dampak dari adanya kejahatan. Hal itu juga akan mempengaruhi pola berfikir seorang anak.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum yang dimaksud di sini yaitu dalil atau hujjah yang menunjukkan adanya kewajiban nafkah terhadap anak. Adapun dasar hukum tentang eksistensi kewajiban nafkah tersebut terdapat dalam ayat Al-Quran dan juga Hadis Rasulullah. Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak, berdasarkan pada dalildalil yang terkandung dalam Al-Quran dan juga Hadis Rasulullah di antaranya yaitu sebagai berikut :

a. Al-Quran

Dalam membangun keluarga tidak akan tercapai keluarga yang bahagia tanpa tercukupinya nafkah. Dalam hal ini merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga, meskipun telah terputus perkawinannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (ath-thalaq : 7)⁵⁴

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang

⁵⁴ Dapertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Op. Cit, h.123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putus bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga diartikan dengan ketakwaan kepada Allah SWT.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi :

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
3. Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁵⁵

. Firman Allah S.W.T:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

⁵⁵ Undang – Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79, h.346

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Baqarah 233)⁵⁶

Pengambilan dalil tentang wajibnya menafkahi anak dari ayat ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu pertama, sesungguhnya Allah swt mewajibkan kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada anak dan ibunya. Kata bapak dalam ayat diatas disebut dengan lafadz al-maulud Lahu, untuk mengingatkan alasan kewajiban tersebut, bahwasanya seorang istri melahirkan anak untuknya. Bahwasanya di dalam kaidah Ushul Fiqh, penentuan hukum atas musytaq (kata asal) menjadi dalil atas kekuatan hukum musytaq minhu (kata bentuk) yang sesuai dengan hukum musyitaq tadi. Dengan demikian diwajibkannya seorang bapak memberikan nafkah kepada orang lain disebabkan karena adanya anak, maka lebih utama untuk memberikan nafkah kepada anak. Kedua, memberi nafkah kepada ibu sama dengan memberi nafkah kepada anaknya. Karena seorang anak membutuhkan seorang ibu untuk melayani, menyusui dan mendidiknya. Bahkan air susu yang merupakan awal dari makanan itu berasal dari ibu. Dengan begitu memberi nafkah kepada ibu sama dengan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya.⁵⁷

⁵⁶ Dapertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Op. Cit, h.57.

⁵⁷ Al-Fauzan Aziz Abdullah, *Fiqh Sosial*, Jakarta, Qishti Press, 2007, h. 206-207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadis Rasulullah

Sedangkan dasar kewajiban nafkah terhadap anak menurut Hadis di antaranya yaitu sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا ابْنَتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ تَحِيحُ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ: حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخاري)

Artinya: “ Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengatuhannya. Rasulullah bersabda, „ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Bukhari)⁵⁸

Hadits di atas menjelaskan bahwa jelas kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

3. Macam – Macam Pemberian Nafkah.

Nafkah Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam :

a. Nafkah Diri Sendiri

Sesorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW :

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ (البخاري مسلم)

⁵⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr, h.193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

“ mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”. (HR. Muslim)⁵⁹

b. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain.

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :

1. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

2. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.

4. Sebab Wajib Memberi Nafkah

a. Sebab Pernikahan.

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *fikih munakahat* (buku II), (Bandung Pustaka Amani, 2001),h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf”. (QS. Al-Baqarah : 228)⁶⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masingmasing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.

b. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan mslahnya kepada Rosulullah SAW. Dia berkata “ Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudarotkan saya”?Beliau menjawab :

خُذِي مِنْ مَّا لِي بِهِ لَمْعَرُوفٍ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ. متفق عليه

Artinya: “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari Muslim)⁶¹

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi

⁶⁰ Dapertemen Agama RI, *Ibid*, h 69

⁶¹ Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006. h. 308.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

5. Batas Usia Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dalam Al-Quran dan Hadits juga tidak diterangkan dengan tegas masa berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas usia pemberian nafkah anak dengan pedoman isyarat-isyarat ayat tersebut.

Dalam hal ini terdapat beberapa hal perbedaan di antara imam madzhab, dan untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat dalam batasan anak mendapatkan hak nafkah anak :

- a. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa masa asuh anak, hingga anak tidak membutuhkan bantuan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci yaitu kira-kira usia anak sampai dengan 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat pada usia 9 tahun.
- b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada anak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulah yang berhak untuk mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban seorang ayah.
- c. Ulama Syafiyyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah dan ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya dialah yang berhak atasnya.

- d. Ulama Hanbaliah mengatakan bahwa masa hak nafkah terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak sudah mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar salah satu dari mereka yang mengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika keduanya berselisih maka anak disuruh memilih.⁶²

Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 yang berbunyi :

- a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melaksanakan perkawinan.
- b) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- c) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁶³

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah menghantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka di hari dewasa.

⁶² Zuhaili Az-Wahbah, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 79-81

⁶³ Kompilasi Hukum Islam, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, *Op.Cit.*, h.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hak dan Kewajiban Memberi Nafkah Anak

Dalam hal pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian antara suami istri, maka ibulah yang berhak dalam mengasuhnya. Hal ini sudah ditetapkan dalam KHI pasal 156 (a) yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadhanah dari ibunya. Adapun remaja yang sudah tidak lagi membutuhkan pengasuhan, maka ia diberi pilihan untuk memilih di antara ayah dan ibunya.

Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya pemeliharaan anak, ayah pun tetap berkewajiban untuk membiayainya. Karena telah berlaku dan ditetapkan dalam KHI pasal 156 huruf (d) dan (f) yaitu: akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.⁶⁴

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

⁶⁴*Ibid*, h.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁶⁵

Sedangkan dalam KHI Pasal 105 dalam hal terjadi perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁶⁶

Ketentuan KHI tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur, walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu belum mumayyiz maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya. Selain itu, anak yang belum mumayyiz maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah mumayyiz maka sang anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya.

Karena ini bekas suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah untuk anak-anaknya. Maka suami hendaknya berusaha sekuat tenaga, agar dapat mencukupi nafkah bagi istri dan anak-anaknya dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan

⁶⁵ Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Op. Cit.*,

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam, (cet 4), Nuansa Aulia 2012, *Op.Cit.*, h,32

yang diridhai Allah SWT. Suami tidak pantas jika berpangku tangan dan tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dari hasil penelitian di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, yang terjadi perihal pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian semua anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya dan di mana dalam pemenuhan hak-hak nafkah anak hanya bersifat pemenuhan yang sementara tidak sepenuhnya bahkan ada juga yang tidak memenuhinya. Dalam hal ini yang banyak berperan pasca perceraian adalah seorang ibu yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung hak nafkah anak tersebut.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak nafkah anak adalah faktor ekonomi, dari kasus yang dipaparkan oleh penulis dimana seorang mantan suami rata-rata tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan ada yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. faktor tidak bertanggung jawab kepada keluarga dimana seorang ayah yang tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap pelaksanaan hak nafkah anaknya, dan ada juga beberapa yang bertanggung jawab tapi sifatnya hanya sementara dan tidak sepenuhnya. faktor komunikasi, setelah terjadinya perceraian banyak sekali seorang mantan suami dan mantan istri tidak lagi menjalin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi. Sehingga sangat berpengaruh dalam hal pembiayaan nafkah anak. faktor ibu sudah mampu menafkahi anaknya, hal ini dikarenakan seorang ibu sudah mempunyai penghasilan sendiri.

3. Ditinjau menurut hukum Islam, pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian suatu kewajiban seorang ayah maka berdosa seorang ayah yang tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian tersebut. Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah melestarikan keturunan, anak adalah amanah Allah SWT yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal dan di didik. Jika orang tua gagal dalam tanggung jawabnya berarti ia telah mengkhianati amanah Allah SWT sehingga ia dinilai tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Dan dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap mantan suami yang sudah melalaikan kewajibannya terhadap anak di Pengadilan Agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian diKecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran dalam rangka perbaikan dan evaluasi dimasa yang akan datang.

Adalah sebagai berikut:

1. Orang tua sebelum memutuskan untuk bercerai sebaiknya difikirkan lebih mendalam lagi akibat yang akan timbul setelah perceraian, akan lebih indah jika orang tua mengalah untuk saling dan bersama-sama mendahulukan kepentingan anak. Karena putusnya perkawinan diantara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua pasti sedikit banyak akan berpengaruh atau berakibat berkurangnya pemenuhan hak yang seharusnya diberikan kedua orang tua terhadap anak.

2. Pemerintah pembuat undang-undang, pengaturan mengenai jaminan terhadap hak anak diatur sedemikian banyak di Indonesia ini, namun untuk aturan mengenai jaminan hak terhadap anak setelah perceraian perlu dipertegas. Pengaturan mengenai jaminan hak terhadap anak pasca perceraian hanya bersifat mengatur tanpa ada sanksi tegas yang menyertainya, hal yang demikian yang kemudian memicu lalainya salah satu atau bahkan kedua orang tua untuk memenuhi kewajibannya setelah perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al- Usrotiwa Ahkamuha fi tasril Islam* (Terj. Abdul Majid Khon), *Fiqh Munakahat Khitbah*, Nikah dan Talaq, Jakarta: Amzah 2009.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006).
- Abi Fadl Shihabuddin, Ruhul Ma'ani fi Tafsiri Al-Qur'an Al-Adzim, jilid I, Beirut: Darul Fikr, 2001.
- Abi Thohir bin Ya'qub, Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas, Beirut, Darul Fikr, 1995.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta Timur : Darul Falah).
- Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta : Qisthi Press).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 1998), cet. 3.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr.
- Al-Fauzan Aziz Abdullah, *Fiqh Sosial*, Jakarta, Qishti Press, 2007.
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: PT, Sygma Examedia, 2009.
- Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986).
- Asril, *Hukum Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru :Suska Press, 2013).
- Beni Ahmad Saebani, *fikih munakahat* (buku II), (Bandung Pustaka Amani, 2001)
- Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006.

- Burhan. Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya, (Jakarta: Putra Grafika 2007).
- Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung : Pt Citra Adtya Bakti, 2003).
- Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia 2001).
- Fina Nuriani “*Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak*(Studi Kasus Pengadilan Agama Mungkid)” Yogyakarta, 2004.
- Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semaran: Karya Abadi Jaya, 2015
- Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, alih bahasa oleh Umar Mujahid, (Solo : PT Aqwa Media Profetika, 2012), cet. Ke-1.
- Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Alkausar, 2002)
- Kompilasi Hukum Islam*, (cet4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah*, (Jakarta :Lentera Hati, 2002), vol 15.
- Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2011.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996).
- Muhammad Asad. Bandingkan dengan Imam Jalil, Mukhtashor Tafsir Ibnu Katsir, Kairo, Darus Shobuni, tth.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Penerbit merah putih, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: percetakan Galangpress, 2009).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.
- Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2005).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjemah: Abdul Ghoffur, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2006.

Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurthubi*, Cet. 2, Maret 2016.

Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2013).

T.M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet.5.

Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Tihami, Sohari Sahrini, *Fiqh munakahat*, jakarta 2009.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012

Tutuk Hamidah “*Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*” Malang: UIN Maliki Press, 2011

Undang – Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79.

Uswatun Hasanah, Judul Skripsi, *Nafkah Untuk Mantan Istri* (Studi Analisis Pandangan Agsar Ali Engineer) Semarang, 2008.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta 2010.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 2006.

Zuhaili Az-Wahbah, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie alKattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3550/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 17 Juni 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nofrialdi
NIM : 11621104016
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kecamatan ujung batu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di kecamatan
ujung batu kabupaten rokan hulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

Drs. H. Hajar., M.Ag
19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS KECAMATAN UJUNG BATU, KABUPATEN ROKAN HULU)**, yang ditulis oleh :

Nama : NOFRIALDI
NIM : 11621104016
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin, 14 Desember 2020
Waktu : Jam, 08.00 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.HI, MA

Penguji I
Dra. Asmiwati, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 119750801 200701 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/33193
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3550/2020** Tanggal 19 Juni 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

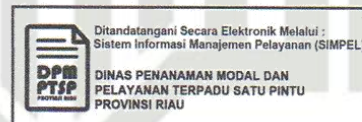
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NOFRIALDI |
| 2. NIM / KTP | : 11621104016 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 Juni 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
 Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
 Kode Pos : 28557 Email : dpmpmsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpmsp.rokanhulukab.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/137

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari DPMPSTP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33193 tanggal 19 Juni 2020 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : NOFRIALDI
 Nomor Induk Mahasiswa : 11621104016
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Jenjang : Sarjana S-1
 Judul Penelitian : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu**
 Lokasi Penelitian : Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih



Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 15 Juli 2020

a.n.BUPATI ROKAN HULU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU,**



GORNENG, S.Sos, M.Si
 Pembina TK.I (IV/b)
 NIP.19740727 200012 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu .
2. Camat Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU KECAMATAN UJUNGBATU

Jl. Jenderal Sudirman No.172 Telp. (0762) 61035
UJUNGBATU

Kode Pos : 28554

REKOMENDASI

Nomor: 503/CMT-UB-PMD/.21.6

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

CAMAT Ujungbatu Kabupaten Rokan hulu, setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/137 Tanggal 15 Juli 2020 tentang Rekomendasi Pelaksanaan **Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : **NOFRIALDI**
Nomor Induk Mahasiswa : 11621104016
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga
Jenjang : S-1 (Strata 1)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Paska Perceraian di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.**
Lokasi Penelitian : Kecamatan **CAMAT Ujungbatu** Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal Rekomendasi ini dibuat

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran Kegiatan Riset ini, terima kasih.

Ditetapkan di : **UJUNGBATU**
Pada tanggal : **01. Dzulhijjah 1441 H**
02 Juli 2020

CAMAT UJUNGBATU,



FISMAN HENDRI, S.Hut
Pembina

NIP. 19761209 200212 1 003

LAMPIRAN

Wawancara Langsung dengan Narasumber



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

NOFRIALDI, Lahir di P.siantar pada tanggal 13 November 1996. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan ayahanda Efrizal dan Ibu Eni Deswita. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 06 Ujung Batu, Rokan Hulu, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Ujung Batu, lulus tahun 2012, Setelah menyelesaikan pendidikan SMP penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Ujung Batu dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul ***“Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu..*** Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 14 Desember 2020 jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3,40 (Sangat Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.